

**IMAGE OF SYMBOLIC RESISTENSE AGAINST
THE HEGEMONY OF PATRIARCHY
IN THE FIELD EDUCATION AND THE ROLE OF WOMEN
IN THE PUBLIC DOMAIN IN *KEHILANGAN MESTIKA*
AND *MANUSIA BEBAS***

(Citraan Perlawanan Simbolis terhadap Hegemoni Patriarki dalam Bidang
Pendidikan dan Peran Perempuan di Wilayah Publik
dalam Novel *Kehilangan Mestika* dan *Manusia Bebas*)

Wiyatmi

Faculty of Languages and Arts, Yogyakarta State University
S3 Science Literature, Gadjah Mada University
wiyatmi_fbs@yahoo.co.id

Abstract

One problem that emerged early in the feminist struggle to Indonesia is the question of the importance of education for women and provide role in women working in the public domain. This is because in a society with a patriarchal system women are considered as domestic creatures, who must stay home and do domestic work (Fakih, 2006). In the history of Indonesia, this issue, is reason Kartini struggle as seen in his letters to his friends in the Netherlands (*Habis Gelap Terbitlah Terang/Door duisternis tot licht*, Abendanon, 1979), followed by Dewi Sartika that founded a special school for women in West Java.

This article will discuss simbolic resistance against the hegemony of the patriarchy in education and the role of women in public life in the novel *Kehilangan Mestika* and *Manusia Bebas*. Both were chosen to represent the other novels. Raising the issue of education for women, the number of new thought that tried to resist or critique of patriarchal culture, the marginalization of women in the tradition of solitude and domestication. This study shows how the emergence of women's education and educated women are represented in the novels of Indonesia.

Based on the discussion of the novel *Kehilangan Mestika* and *Manusia Bebas* can be concluded that resistance to the hegemony of patriarchy through the struggle of women to have the opportunity to enjoy education and participate in the public arena, both as women's work and women's activist organization. These findings indicate that both the novel has had a role in making the criticism (symbolic resistance) against the prevailing patriarchal hegemony in society, since the colonial period up to now is full of gender inequality. Resistance is realized by providing opportunities for women to continue their education at school and outside school, as well as providing opportunities for women to participate in the public arena, both as workers and women's activist organizations

Key word: Indonesian novel, symbolic, images of resistance, Indonesia novels

Pendahuluan

Pada saat ini kaum perempuan telah mendapatkan kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan di semua jenjang dan bidang, bahkan juga memasuki lapangan kerja di hampir semua bidang pekerjaan, di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, hal ini bukan berarti keadaan tersebut telah dapat dinikmati oleh kaum perempuan di semua lapisan masyarakat dan daerah. Masih banyak kaum perempuan di daerah terpencil yang belum mendapatkan kesempatan tersebut. Padahal pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang dipercaya mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara yang senantiasa memberikan perhatian kepada penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan yang memberikan perhatian secara khusus kepada kaum perempuan. Meskipun perjuangan di bidang pendidikan di Indonesia telah memiliki usia yang cukup panjang, data-data nyata di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan tersebut ternyata belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara luas, termasuk kaum perempuan dan masyarakat miskin.

Isu pentingnya pendidikan bagi perempuan juga telah menjadi hal yang mengemuka dalam perjuangan para feminis di Indonesia. Hal ini karena dalam masyarakat dengan sistem patriarki perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, yang harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik (Fakih, 2006). Dalam sejarah Indonesia, isu ini pulalah yang mendorong perjuangan Kartini, seperti tampak dari Surat-suratnya kepada para sahabatnya di Belanda (*Habis Gelap Terbitlah Terang*, Abendanon, 1979), dilanjutkan oleh Dewi Sartika yang mendirikan sekolah khusus bagi perempuan di Jawa Barat, dan organisasi perempuan yang tumbuh berikutnya (Muljana, 2008:307-313). Gagasan Kartini mengenai pentingnya pendidikan perempuan dikemukakan dalam salah satu suratnya yang dikirimkan kepada Nyonya N. van Kol:

Karena saya yakin sedalam-dalamnya, perempuan dapat menanamkan pengaruh besar ke dalam masyarakat, maka tidak ada sesuatu yang lebih baik dan sungguh-sungguh yang saya inginkan kecuali dididik dalam bidang pengajaran, agar kelak saya mengabdikan diri kepada pendidikan anak-anak perempuan kepala-kepala Bumiputra. Aduhai, ingin sekali, benar-benar saya ingin mendapat kesempatan memimpin hati anak-anak, membentuk watak, mencerdaskan otak muda, mendidik perempuan untuk masa depan, yang dengan baik akan dapat mengembangkannya dan menyebarkannya lagi...

(Surat Kartini kepada Nyonya N. van Kol, Agustus 1900, Sulastin-Sutrisno, 1979:119).

Selain mengajar beberapa gadis di lingkungannya di serambi muka rumahnya, Kartini belum menyelenggarakan sekolah untuk perempuan secara formal. Usianya yang relatif pendek (25 tahun), rupanya menyebabkan gagasan tersebut belum sempat direalisasikan. Hal ini berbeda dengan Dewi Sartika yang berhasil

menyelenggarakan sekolah khusus untuk anak perempuan di Sekolah Keutamaan Istri di Bandung, yang dibuka mulai 1902.

Isu mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan yang berkembang dalam masyarakat tersebut juga tergambarkan dalam karya sastra (novel-novel) Indonesia, bahkan sejak perkembangan awalnya di tahun 1920-an. Hal ini karena pada dasarnya keberadaan karya sastra tidak terlepas dari dunia nyata. Dalam hubungan antara karya sastra dengan kenyataan, Teeuw (1984:228) menjelaskan adanya hubungan ketegangan antara kenyataan dan rekaan dalam roman (novel). Dalam sebuah novel dunia nyata dan dunia rekaan saling berjalanan, yang satu tidak bermakna tanpa yang lain. Keberadaan karya sastra berdampingan dengan dunia realita (Chamamah-Soeratno, 1994a:189-190). Apa yang terjadi dalam kenyataan sering kali memberi inspirasi pada pengarang untuk menggambar-kannya kembali dalam karya sastra yang diciptakannya. Oleh karena itu, sastra selalu berurusan dengan diri pribadi manusia, diri manusia dalam masyarakat, dan dengan masyarakat yang menjadi lembaga tempat manusia berkiprah (Chamamah-Soeratno, 1994b:10).

Oleh karena itu, ketika isu pendidikan bagi perempuan yang sejak sebelum kemerdekaan yang digagas dan dipelopori oleh Kartini, Dewi Sartika, serta Roehana Koedoes, sampai saat ini mendapatkan perhatian cukup besar di masyarakat, munculnya sejumlah novel Indonesia yang mengangkat isu tersebut merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Maraknya sejumlah novel Indonesia yang merepresentasikan isu keterdidikan perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga menunjukkan adanya kepedulian para pengarang Indonesia terhadap problem-problem yang berhubungan pendidikan bagi perempuan. Hal itu karena di dalam masyarakat karya sastra memiliki salah satu fungsi sebagai sarana menyuarakan hati nurani masyarakat, di samping fungsi-fungsi lainnya. Sejak zaman dahulu ciptaan sastra dipersepsi sebagai produk masyarakat yang mampu memberi makna bagi kehidupan, mampu menyadarkan masyarakat akan arti hidup, mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan (Chamamah-Soeratno, 1994b:14).

Secara pragmatik peran karya sastra dalam masyarakat antara lain karena dapat menggerakkan pembacanya agar bersikap, berperilaku, dan bertindak sebagaimana yang di" saran"kan oleh teksnya. Kehadiran karya sastra diharapkan mampu menggerakkan masyarakat menjadi lebih peka dan responsif dalam menghadapi gejala yang berkembang dalam masyarakat (Chamamah-Soeratno, 1994b:5). Dalam konteks ini, dengan banyaknya novel Indonesia yang mengangkat berbagai isu gender, termasuk isu keterdidikan perempuan yang menjadi fokus cerita diasumsikan dapat membuat masyarakat pembaca menjadi lebih peka dan responsif terhadap berbagai masalah relasi dan ketidakadilan gender yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan observasi awal terhadap sejumlah novel Indonesia, tampak bahwa isu keterdidikan perempuan dan lahirnya kaum perempuan terdidik yang berperan di ranah publik telah digambarkan dalam novel *Azab dan Sengasara* (Merari Siregar, 1920), *Sitti Nurbaya* (Marah Rusli, 1922), *Kehilangan Mestika* (Hamidah, 1935), *Layar Terkembang* (Sutan Takdir Alisyahbana, 1936), *Belenggu* (Armijn Pane, 1940), *Manusia Bebas* (Soewarsih Djojopuspito, 1944),

Widyawati (Arti Purbani, 1948), *Jalan Bandungan* (Nh. Dini, 1989), *Burung-burung Manyar* (Y.B. Mangunwijaya, 1981), *Saman* (Ayu Utami, 1999), *Namaku Teweraut* (Ani Sekarningsih, 2000), *Geni Jora* (Abidah El-Khalieqy, 2004).

Makalah ini tidak akan membahas semua novel tersebut, tetapi hanya akan mengambil dua buah sampel, yaitu *Kehilangan Mestika* dan *Manusia Bebas*. Kedua novel tersebut dipilih untuk mewakili novel-novel lainnya. Dengan mengangkat isu keterdidikan perempuan, sejumlah novel tersebut dianggap telah mencoba melawan atau mengkritisi kultur patriarki yang memarginalisasikan perempuan dalam tradisi pingitan dan domestikasi. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana pendidikan bagi perempuan dan munculnya para perempuan terdidik direpresentasikan dalam novel-novel Indonesia.

Isu yang keterdidikan perempuan yang terepresentasikan dalam novel-novel Indonesia akan dikaji dengan kritik sastra feminis. Melalui kajian yang berperspektif feminis gambaran dan eksistensi perempuan yang terepresentasikan dalam karya sastra diharapkan lebih dapat dipahami. Hal ini karena seperti dikemukakan oleh Reinhartz (2005:221) bahwa penelitian feminis memiliki tujuan untuk mengidentifikasi penghilangan, penghapusan, dan informasi yang hilang tentang perempuan secara umum. Reinhartz (2005:67) juga menegaskan bahwa memahami perempuan dari perspektif feminis adalah memahami pengalaman dari sudut pandang perempuan sendiri, yang akan memperbaiki ketimpangan utama cara pandang nonfeminis yang meremehkan aktivitas dan pemikiran perempuan, atau menafsirkannya dari sudut pandang laki-laki di masyarakat atau peneliti laki-laki. Melalui kajian feminis diharapkan juga dapat terungkap kemungkinan adanya kekuatan budaya patriarki yang membentuk citra mengenai perempuan maupun laki-laki, relasi antarkeduanya, ataupun adanya perlawanan terhadap dominasi patriarki yang terefleksi dalam karya-karya sastra tersebut. Seperti dikemukakan oleh Reinhartz (2005:202) bahwa ciri khas kajian feminis adalah menguak budaya patriarki yang kuat dan bahkan membenci perempuan (misoginis).

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan manusia, sebuah novel diciptakan bukan untuk tujuan estetis semata, seperti diyakini oleh teori struktural objektif atau sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, seperti diyakini oleh teori marxis. Sebagai bagian dari kebudayaan novel memiliki posisi yang cukup penting, yaitu mengemban fungsi sosial sebagai salah satu sarana untuk membantu mengkonstruksi masyarakat yang dideadkan (Gramsci, via Faruk, 1994). Walaupun untuk sampai ke tahap tersebut, sering kali harus melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai mapan dan dominan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Perlawanan yang dilakukan melalui sebuah karya sastra (novel) merupakan perlawanan yang bersifat simbolis. Hal ini karena perlawanan tersebut dilakukan melalui kata-kata dan gagasan yang diungkapkan dalam sebuah novel. Sebagai mana dikemukakan oleh Damono (dalam Kratz, 2000:650-653) bahwa sastra mencerminkan persoalan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, kalau pengarang memiliki taraf kepekaan yang tinggi, karya sastra yang dihasilkannya juga mencerminkan kritik sosial yang (barangkali tersembunyi) ada dalam masyarakat. Kepekaan semacam itu telah dimiliki oleh sejumlah

sastrawan zaman lampau sampai sekarang. Dalam hal ini, Damono (dalam Kratz, 2000:650-653) mencontohkan bagaimana pujangga Ronggowarsito, telah mengkritik kebobrokan masyarakatnya pada abad kesembilanbelas. Fungsi novel dalam hal ini dianggap sebagai arena untuk menggambarkan ketimpangan sosial dan untuk menyampaikan perlawanan terhadap ketimpangan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, novel Indonesia yang mengusung ideologi kesetaraan gender dianggap sebagai sarana perlawanan simbolis terhadap berbagai ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakat akibat hegemoni patriarki.

Dalam konteks kajian gender dikemukakan bahwa hubungan antara perempuan dengan laki-laki, serta pembagian peran sosial dan privat antara perempuan dengan laki-laki telah diatur oleh sebuah ideologi gender yang dikenal dengan istilah patriarki. Patriarki adalah sistem hubungan antara jenis kelamin yang dilandasi hukum kebapakan. Walby (1989:213-220) menjelaskan bahwa patriarki adalah sebuah sistem dari struktur sosial, praktik yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Walby membedakan patriarki menjadi dua, yaitu patriarki privat dan patriarki publik. Menurut Walby terjadi ekspansi wujud patriarki dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang lebih luas yaitu negara. Ekspansi ini menyebabkan patriarki terus menerus berhasil mencengkeram dan mendominasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Dari teori tersebut, dapat diketahui bahwa patriarki privat bermuara pada wilayah rumah tangga. Wilayah rumah tangga ini dikatakan Walby (1989) sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sedangkan patriarki publik menempati wilayah-wilayah publik seperti lapangan pekerjaan dan negara. Ekspansi wujud patriarki ini merubah baik pemegang "struktur kekuasaan" dan kondisi di masing-masing wilayah (baik publik atau privat). Dalam wilayah privat misalnya, dalam rumah tangga, yang memegang kekuasaan berada di tangan individu (laki-laki), tapi di wilayah publik, yang memegang kunci kekuasaan berada di tangan kolektif.

Hegemoni patriarki terus menerus disosialisasikan dari generasi ke generasi, bahkan juga melalui undang-undang dan kekuasaan negara. Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, terutama pasal 31 (3), yang masih digunakan di Indonesia sampai sekarang misalnya dikemukakan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1), sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2). Dengan pembagian peran yang demikian berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak, dan kewajiban melayani suami (Arivia, 2006:437).

Pembahasan

Dari pembacaan dan analisis terhadap novel *Kehilangan Mestika* karya Hamidah (1935) dan *Manusia Bebas* karya Soewarsih Djojopuspito (1944) diperoleh adanya gambaran mengenai perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan dan bekerja di arena publik di tengah kuatnya hegemoni patriarki yang ingin mendomsetikasikan perempuan.

Novel *Kehilangan Mestika* bercerita tentang seorang perempuan, Hamidah, dari Bangka yang melakukan pendobrakan tradisi pingitan yang masih berlaku di masyarakatnya. Kutipan berikut menggambarkan hal tersebut.

Karena di negeriku akulah pertama sekali membuka pintu pingitan gadis-gadis, maka bermacamlah cacian yang sampai ke telinga kaum keluargaku. Orang negeriku masa itu masih terlalu bodoh dan kuno. Tak tahu mereka membedakan yang mana dikatakan adat dan yang mana pula agama. Kebanyakan dari pada adat yang diadatkan disangkakan mereka sebagian juga dari pada syarat agama. Gadis-gadis masih dipingit, tak boleh kelihatan oleh orang yang bukan sekeluarga lebih-lebih oleh laki-laki. Inilah yang kucita-citakan...

(Hamidah, 1959: 22).

Pingitan adalah sebuah tradisi yang ada di beberapa masyarat di Indonesia yang mengharuskan seorang anak perempuan berumur 12 tahun harus tinggal di rumah, sampai mendapatkan jodohnya. Seperti dikemukakan oleh Sitisemandari Soeroto dalam buku *Kartini Sebuah Biografi* (2001:4) bahwa pada masa penjajahan Belanda berlaku adat istiadat feodal di kalangan kaum bangsawan menengah dan atas yang disebut pingitan. Mengenai makna pingitan ini pernah dikemukakan oleh de-Stuers, yang meneliti gerakan perempuan di Indonesia, yang kemudian diterbitkan dalam dalam buku *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian* (2008). Katanya kata dipingit diambil dari kata “kuda pingit” yang artinya kuda yang dikurung di dalam kandang dan tidak dibiarkan bebas berkeliaran seperti kuda lain. Metafora tersebut dapat diterima karena adanya asosiasi makna antara kuda yang tidak diperbolehkan keluar kandang, dengan seorang perempuan yang tidak dipetrbolehkan keluar dari lingkungan rumahnya.

Gambaran mengenai tradisi pingitan terhadap anak-anak perempuan, misalnya di Jawa juga tampak pada surat-surat Kartini (*Door Duisternis tot Licht/Habis Gelap Terbitlah Terang*, J.H. Abendanon, 1979), yang merefleksikan kondisi masyarakat pada zamannya. Dalam salah satu surat Kartini berikut misalnya, tampak adanya praktik pingitan yang dialami gadis-gadis Jawa.

Ketika umur gadis itu menginjak 12 ½ tahun, tibalah waktunya ia meninggalkan hidup kanak-kanaknya yang lela. Ia harus minta diri dari bangku sekolah, tempat duduk yang disukainya. Ia harus pamit pada

teman-temannya bangsa Eropah, padahal ia senang sekali berada di tengah-tengah mereka. Ia dipandang cukup dewasa untuk pulang dan tuntud kepada kebiasaan negerinya, yang memerintahkan kepada anak-anak perempuan nuda tinggal di rumah, hidup benar-benar terasing dari dunia luar sampai tiba saatnya datang laki-laki, yang diciptakan Tuhan bagi mereka masing-masing untuk menuntutnya dan membawanya pulang ke rumahnya....

(Surat Kartini kepada Ny R.M. Abendanon-Madri, Sulastin-Sutrisno, 1979:50-51).

Di samping harus berhadapan dengan tradisi pingitan yang berlaku tidak hanya di Bangka (Sumatra), seperti digambarkan dalam Kehilangan Mestika dan Jawa, seperti digambarkan dalam Surat-surat Kartini, pada awal masa kolonial, yang menjadi latar kedua novel yang dianalisis, para perempuan yang akan belajar di sekolah juga terkendala oleh jumlah sekolah yang masih terbatas, yang tidak semuanya dapat dimasuki oleh perempuan. Sesuai dengan konteks sosial historis saat itu, jumlah sekolah dan orang Indonesia yang menempuh pendidikan masih sangat sedikit, terlebih kaum perempuan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muljana (2008:11) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahlenfeld yang dimuat di harian *de Locomotief* pada awal abad XX di Pulau Jawa rata-rata dari 1000 orang hanya 15 orang saja yang dapat membaca dan menulis. Bila perempuan dihitung, jumlahnya menjadi 16. Sementara itu, berdasarkan penelitian Groeneboer, Gouda (2007: 142) mengemukakan data bahwa pada tahun 1915 jumlah murid Indonesia yang sekolah di HIS Negeri adalah 18.970 (laki-laki) dan 3.490 (perempuan); 1925: 28.722 (laki-laki) dan 10.195 (perempuan); 1929-1930: 29.984 (laki-laki) dan 11.917 (perempuan); 1934-1935: 31.231 (laki-laki) dan 15.492 (perempuan); 1939-1940: 34.307 (laki-laki) dan 19.605 (perempuan). Data-data tersebut menunjukkan masih rendahnya partisipasi pendidikan pada masyarakat Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan.

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa perjuangan kaum pribumi untuk mendapatkan akses pendidikan pada saat itu merupakan hal yang cukup penting, lebih-lebih pendidikan bagi perempuan. Dalam hal ini Kartini dan Dewi Sartika merupakan dua tokoh penting yang merintis perjuangan pendidikan bagi perempuan. Gagasan Kartini tentang pendidikan bagi perempuan disampaikan dalam surat-suratnya kepada beberapa orang sahabatnya di Belanda (*Door Duisternis tot Licht/ Habis Gelap Terbitlah Terang*, J.H. Abendanon, 1979) dan realisasinya membuka kelas untuk anak-anak perempuan di rumahnya. Gagasan Kartini kemudian direalisasikan oleh Dewi Sartika, yang pada tahun 1904 mendirikan sekolah pertamanya untuk perempuan di Jawa Barat (Sunda) dengan nama Keutamaan Istri (de-Stuers, 2007:74). Dari kenyataan tersebut menunjukkan adanya upaya memperjuangkan pendidikan bagi perempuan pada masa tersebut.

Dalam novel *Kehilangan Mestika* tidak hanya diceritakan bagaimana Hamidah menjadi salah satu pelopor yang mendobrak tradisi pingitan, tetapi dia juga merupakan salah satu perempuan yang oleh ayahnya dikirim ke sekolah

guru, Sekolah Normal Putri (*Normal School*, sebuah sekolah guru pada masa kolonial Belanda) di Padangpanjang, sehingga setelah lulus akan menjadi seorang guru. Ayah Hamidah memandang bahwa pendidikan bagi perempuan sangat penting agar perempuan dapat berguna bagi bangsanya.

Akan diriku bersama dengan seorang saudaraku yang lain, meneruskan pelajaran kami ke sekolah Normal Putri di Padang Panjang. Tatkala akan meninggalkan ayah dan kampung halaman yang pertama kali, tambahan pula akan mengarungi lautan yang dalam dan lebar, timbullah kadang-kadang hati yang cemas. Mula-mula malaslah akan berangkat itu, meninggalkan segala yang dikasihi di kampung sendiri. Tetapi ayah yang ingin melihat anaknya menjadi orang yang berguna di kemudian hari untuk bangsa dan tanah air, menyuruh dengan tipu muslihat yang amat halus.

(Hamidah, 1935:6).

Hamidah tidak hanya diberi kesempatan menempuh pendidikan sampai ke luar daerah --keluarga Hamidah tinggal di Mentok, pulau Bangka, bersekolah di Padang Panjang (Sumatra Barat)--, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan menjalani profesi sebagai guru. Pilihan terhadap Sekolah Normal Putri (*Normal School*) telah mengarahkan bahwa Hamidah akan bekerja setelah lulus dari sekolahnya. *Normal School* adalah sekolah pendidikan guru pada masa kolonial Belanda (Gouda, 2007:171).

Dengan menggambarkan tokoh Hamidah, yang bersekolah untuk dapat bekerja sebagai guru, tampak adanya kesadaran pada penulis untuk melawan anggapan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk domestik. Caci maki yang dilontarkan masyarakat terhadap keluarga Hamidah menunjukkan masih kuatnya masyarakat menganut kultur patriarki. Dalam novel *Kehilangan Msetika* juga digambarkan bahwa Hamidah memiliki kesadaran untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat sekitarnya yang sebagian besar masih buta huruf dan menjalankan tradisi pingitan. Setelah lulus dari sekolah Normal Putri, Hamidah kembali ke kampung halamannya dan menyelenggarakan kegiatan sosial memberikan pelajaran membaca dan menulis kepada para tetangganya.

Bapaku rupa-rupanya sudah lebih dahulu menyelami sekaliannya itu. Beliau menghendaki supaya aku tinggal di negeriku sendiri, berusaha memberikan pelajaran di antara saudara-saudaraku, supaya mereka dapat menurut kemauan zaman. Bukankah saudara-saudara itu masih jauh betul ketinggalan.

Besoknya aku mengurus sekalian keperluan pekerjaanku dan lusanya kumulai sekali mengajar. Karena di negeriku akulah pertama sekali membuka pintu pingitan gadis-gadis, maka bermacamlah cacian yang sampai ke telinga kaum keluargaku. Orang negeriku masa itu masih terlalu bodoh dan kuno. Tak tahu mereka membedakan yang mana dikatakan adat dan yang mana pula agama.

Kebanyakan dari pada adat yang diadatkan disangkakan mereka sebagian juga dari pada syarat agama. Gadis-gadis masih dipingit, tak boleh kelihatan oleh orang yang bukan sekeluarga lebih-lebih oleh laki-laki. Inilah yang kucita-citakan. Aku ingin melihat saudara-saudaraku senegeri berkeadaan seperti saudara-saudaraku di tanah Jawa. (Hamidah, 1935: 22).

Apa yang dilakukan oleh Hamidah menunjukkan adanya tanggung jawab sosialnya untuk berbagi kemampuan yang dimilikinya dengan memberikan pendidikan bagi kaum perempuan di sekitar tempat tinggalnya yang masih terbelakang. Perbuatan yang dilakukan Hamidah ini tampaknya sama dengan yang dilakukan oleh Kartini, setelah dia harus tinggal di rumah dan menjalani pingitan. Kartini telah membuka sekolah di rumahnya untuk mengajari anak-anak perempuan tetangganya membaca dan menulis (surat Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 Juli 1903; de-Stuers, 2008:7).

Kalau dalam *Kehilangan Mestika* masih digambarkan bagaimana seorang perempuan harus berjuang melawan tradisi pingitan untuk dapat menempuh pendidikan dan bekerja di arena publik, dalam novel berikutnya, *Manusia Bebas*, digambarkan bagaimana para perempuan harus berjuang dalam lapangan pendidikan, sebagai guru, untuk mencerdaskan bangsanya.

Dalam novel *Manusia Bebas* yang ditulis oleh Soewarsih Djojopuspito ini dengan latar waktu sekitar tahun 1930-an dan latar tempat sebagian besar di Bandung dan Yogyakarta diceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh sejumlah kaum intelektual pribumi di lapangan pendidikan swasta dan organisasi perempuan. Bersama suaminya, Sudarmo, Sulastri dan kawan-kawannya adalah sosok kaum muda yang mendirikan sekolah-sekolah swasta (Perguruan Kebangsaan) untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah pemerintah. Karena berseberangan dengan pemerintah kolonial, keberadaan sekolah-sekolah swasta tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Beberapa guru dilarang mengajar, sampai akhirnya sekolah terpaksa harus ditutup. Peristiwa ini merupakan dampak dari didirikannya Ordonansi Guru oleh pemerintah kolonial pada tahun 1932. Ordonansi Guru didirikan untuk mengatur dan mengawasi keberadaan sekolah-sekolah swasta. Aturan tersebut antara lain adalah bahwa sebelum sekolah swasta dibuka harus mendapatkan izin dari pemerintah, termasuk siapa saja guru-guru yang boleh mengajar. Kurikulum pun harus sesuai dengan kurikulum pemerintah. Proses belajar mengajar diawasi oleh inspektorat sekolah yang berwenang memeriksa kelas setiap waktu (de-Stuers, 2008:128). Akibatnya, banyak guru-guru yang karena memiliki semangat nasionalisme tinggi, nonkooperatif dengan pemerintah kolonial dilarang mengajar, seperti dialami oleh tokoh Sulastri dan suaminya Sudarmo.

Setelah dilarang mengajar Sulastri mencoba menjadi seorang penulis novel. Novel pertamanya yang ditulis dalam bahasa Sunda dan dikirimkan ke sebuah penerbit (pada tahun 1930-an, Balai Pustaka adalah penerbit yang paling berkuasa) dikembalikan, ditolak penerbit. Setelah mengatasi kekecewaannya, dia mulai lagi menulis sebuah novel yang bercerita tentang perjalanan hidupnya

sebagai seorang guru sekolah swasta pada masa pemerintah kolonial yang harus berjuang dengan idealisme.

Sementara itu, peran perempuan dalam organisasi perempuan dalam *Manusia Bebas* tampak pada aktivitas Marti, adik Sulastrri, yang tinggal di Jakarta menjadi ketua organisasi perempuan yang bernama Perempuan Insaf dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia (h.16, 185, 191, 192). Gambaran mengenai peran perempuan yang berjuang dalam organisasi perempuan dalam *Manusia Bebas* menunjukkan adanya hubungan dengan maraknya sejumlah organisasi perempuan pada tahun 1920-1930-an dan peristiwa Kongres Perempuan I dan seterusnya. Gagasan mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan dan nasib perempuan pada masa itu dan cita-cita perempuan Indonesia yang disampaikan dalam kedua novel tersebut merefleksikan gagasan yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan tersebut. Kongres Perempuan I diselenggarakan atas prakarsa Nyonya Soekonto, guru perempuan di sekolah Belanda Pribumi dan anggota Komite Wanita Utomo, seperti Nyonya Suwardi (Nyi Hadjar Dewantoro) dan Soejatin (Nyonya Kartowijono), guru Perguruan Taman Siswa dan anggota Komite Putri Indonesia (Stuers, 2007:133).

Dari uraian tersebut tampak bahwa novel *Manusia Bebas* dengan jelas menggambarkan bagaimana perempuan telah ikut berjuang bersama laki-laki, baik suami, saudara, maupun sahabatnya untuk melawan kolonialisme Belanda. Dengan penuh kesadaran Sulastrri mengemukakan cita-cita perjuangannya tersebut dalam surat yang dikirimkan kepada kakak perempuannya, Marti.

“Marti,

Doakanlah aku dapat bekerja dengan penuh cita-cita. Kau masih ingat, bahwa persaudaraan antara kau dan aku harus mengekalkan kesetiaan kita akan sumpah kita berdua: bekerja bagi mereka yang tertindas dan untuk Indonesia, tanah air kita bersama.

Lastri .

(Djojopuspito, 1975: 18).

Pada kutipan tersebut tampak bahwa Sulastrri digambarkan sebagai seorang guru perempuan yang bekerja, bukan hanya karena harus bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, karena motivasi melawan penjajahan kolonial Belanda dan mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Sebelum menikah dengan Sudarmo, seorang direktur Sekolah Kebangsaan di Bandung dan anggota partai Marhaen, Sulastrri telah bekerja sebagai guru di Purwakarta. Karena harus ikut berjuang bersama suaminya, maka dia melepaskan pekerjaannya di Purwakarta dan pindah ke Bandung. “Bukankah Sudarmo bekerja bagi kepentingan nasional? Aku akan merasa malu; jika aku tak mendampinginya dalam pekerjaannya.” (Djojopuspito, 1975: 16).

Gambaran mengenai masuknya perempuan di dunia pendidikan yang dilanjutkan dengan bekerja sebagai guru/pendidik dalam kedua novel yang dikaji memiliki hubungan dengan konteks sosial historis akhir 1920 dan awal 1930, ketika para intelektual perempuan, kebanyakan para guru aktif dalam

berbagai organisasi perempuan dan terlibat dalam Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta dan Kedua di Jakarta. Para perempuan terdidik tersebut juga ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan, seperti ditunjukkan oleh tokoh Sulatri.

Adanya hubungan antara perjuangan para perempuan terdidik dalam lapangan pendidikan maupun pergerakan meraih kemerdekaan ini telah diuraikan oleh Stuers (2008: 83). Stuers mengemukakan bahwa perjuangan para perempuan sebelum kemerdekaan mendapatkan dukungan dan bantuan dari organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo. Organisasi yang didirikan oleh dr. Wahidin Sudirohusodo pada 1908 dengan menekankan bidang pendidikan dan kebudayaan ini bertujuan utama mewujudkan kemerdekaan Indonesia (Stuers (2008: 83). Di samping itu, keterlibatan para intelektual perempuan dengan perjuangan merebut kemerdekaan juga terjadi karena sejumlah organisasi pergerakan nasional seperti Sarikat Islam, Muhammadiyah, Jong Java, Taman Siswa dalam perkembangannya membentuk organisasi khusus bagi perempuan. Beberapa organisasi perempuan yang memiliki hubungan dengan organisasi pergerakan nasional tersebut adalah *Wanudijo Utomo*, kemudian diubah menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia (SPII), dibentuk oleh Sarekat Islam; Aisjiah, organisasi perempuan dibentuk oleh Muhammadiyah, Wanito Taman Siswa, dibentuk oleh Taman Siswa (Stuers, 2008: 93-97). Oleh karena itu, gambaran mengenai peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan seperti yang terdapat dalam novel *Manusia Bebas* merefleksikan realitas sosial historis sebelum kemerdekaan.

Dalam perspektif feminis apa yang dilakukan oleh para perempuan dalam kedua novel yang dikaji menunjukkan adanya bentuk perlawanan simbolis terhadap dominasi patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik, yang dikonstruksi sebagai ibu rumah tangga. Masuknya para perempuan ke sekolah dan arena publik, baik sebagai perempuan bekerja maupun aktivis organisasi sosial telah menunjukkan adanya gagasan mengenai kesetaraan gender dan menolak anggapan bahwa keberadaan perempuan berada di kelas dua (*the second class*), liyan (*the other*), atau dimarginalkan (de Beauvoir, 2003: x-xii). Hegemoni patriarki yang mengurung perempuan di rumah dan membatasi gerak serta mengabaikan suaranya ternyata telah mengganggu ketentraman para sastrawan, sehingga mereka mengkritiknya dengan cara menulis karya novel yang mengangkat gagasan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan peran perempuan di ranah publik, sehingga pelan-pelan akan tercapai kesetaraan gender dalam masyarakat. Dengan menggambarkan perjuangan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan di arena publik, kedua novel yang dikaji telah mencoba melakukan perlawanan simbolis terhadap hegemoni patriarki, yang mengkonstruksi perempuan sebagai makhluk domestik, yang harus menjalani pengitan pada masa remaja dan menjadi ibu atau ratu rumah tangga setelah mereka menikah.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap novel *Kehilangan Mestika* dan *Manusia Bebas* dapat disimpulkan bahwa perlawanan terhadap hegemoni

patriarki dilakukan melalui perjuangan para perempuan untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan dan berperan di ranah publik, baik sebagai perempuan bekerja maupun aktivis organisasi perempuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua novel tersebut telah ikut berperan dalam melakukan kritik (perlawanan simbolis) terhadap hegemoni patriarki yang berlaku dalam masyarakat, sejak masa kolonial sampai sekarang yang penuh dengan ketidakadilan gender. Perlawanan tersebut diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk menempuh pendidikan di sekolah dan di luar sekolah, serta memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk ikut berperan di arena publik, baik sebagai pekerja maupun aktivis organisasi perempuan.

Yogyakarta, Awal Oktober 2010

Daftar Pustaka

- Abendanon, J.H. 1979. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Sulastin Sutrisna dari Bahasa Belanda: *Door Duisternis Tot Licht*. Jakarta: Djambatan.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Beauvoir, Simone de. 2003. *Second Sex: Fakta dan Mitos*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Toni B. Febriantono. Surabaya: Pustaka Promothea.
- Blackburn, Susan. Ed. 2007. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Chamamah-Soeratno, Siti. 1994a. "Penelitian Sastra dari Sisi Pembaca: Satu Pembicaraan Metodologi," dalam *Teori Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Masyarakat Poetika Indonesia IKIP Muhammadiyah Yogyakarta.
- _____. 1994b. "Sastra dalam Wawasan Pragmatik: Tinjauan atas Asas Relevansi di dalam Pembangunan Bangsa." Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 24 Januari 1994.
- Damono, Sapardi Djoko. "Kritik Sosial dalam Sastra Indonesia," dalam U. Kratz, ed. *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Djojopuspito, Soewarsih. 1975. *Manusia Bebas*. Jakarta: Djambatan.
- Fakih, Mansoer, 2006. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Cet. Ke-10).
- Faruk. 1994. *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gouda, Frances. 1995. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1984*. Diterjemahkan dari *Dutch Culture Overseas*:

- Colonial Practice in the Netherland Indies 1990-1942* oleh Jugiarie Soegiarto & Suma Riella Rustdiarti. Jakarta: PT Serambi Ilmu.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I*. Yogyakarta: LKIS.
- Reinharz, Shulamit. 2005. *Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Lisabona Rahman dan J. Bambang Agung. Jakarta: Woman Reseach Institute.
- Soeroto, Sitisomandari. 2001. *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Djambatan. Cetakan ke-6.
- De Stuers, Cora Vreede, 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Undang Undang RI Nomor 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Diunduh dari <http://www.lbh-apik.or.id/uu-perk.htm> diunduh melalui www.google.com 12 Juni 2010.
- Walby, Silvia. 1989. "Theorizing Patriarchy," in *Sociology Journal* Vol 23 (2) hlm. 213-231.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.